

## Program Pemberdayaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Suku Anak Dalam di Kabupaten Sarolangun

Devita Ruaida, M. Ridwan, Vinna Rahayu Ningsih

Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan, Universitas Jambi

Korespondensi : M. Ridwan, e-mail: [fk.m.ridwan@unja.ac.id](mailto:fk.m.ridwan@unja.ac.id)

### ABSTRAK

Komunitas Adat Terpencil, dalam hal ini Suku Anak dalam Jambi, memiliki keterbatasan terhadap akses pelayanan sosial, ekonomi maupun politik. Komunitas Adat Terpencil perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Salah satunya adalah melalui pemberdayaan masyarakat secara komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Pada saat ini, masih kurang keterlibatan seluruh komponen, baik pemerintah, pihak swasta, *stakeholder*, dan masyarakat setempat untuk berkontribusi dalam pembangunan Komunitas Adat Terpencil. Tujuan Penelitian ini ialah untuk mengetahui gambaran pelaksanaan pemberdayaan suku anak dalam di Kabupaten Sarolangun. Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam dan telaah dokumen. Informan penelitian sejumlah 6 orang, yaitu berasal dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan serta Puskesmas Limbur Tembesi Sarolangun. Hasil penelitian digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Suku Anak, termasuk di bidang kesehatan seperti melakukan pengecekan kesehatan, posyandu, pemberian Kartu Indonesia Sehat serta Puskesmas Keliling. Sebagian besar pemberdayaan belum berhasil karena Suku Anak Dalam belum mampu memandirikan diri sendiri maupun keluarga, dan masih memiliki kebiasaan yang sulit untuk di tinggalkan. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang baik antar lintas sektor agar tercapainya kesejahteraan.

Kata kunci: Pemberdayaan; Implementasi; Keberlanjutan Program; Suku Anak Dalam

### ABSTRACT

*Remote Indigenous Communities, in this case, the Anak Dalam Tribe in Jambi, have limited access to social, economic and political services. Remote Indigenous Communities need to make various efforts to improve their quality of life. One way is through community empowerment in a comprehensive, integrated and sustainable manner. Currently, there is still a lack of involvement of all components, including the government, the private sector, stakeholders and the local community to contribute to the development of Remote Indigenous Communities. The purpose of this study was to find out the description of the implementation of ethnic child empowerment in Sarolangun Regency. This research is descriptive qualitative type. The method used indepth interview and review document. There were 6 informants in this study, namely from the Social Service, Health Service, and the Limbur Tembesi Sarolangun Health Center. The results of the research are used to improve the welfare of the Tribe Anak community, including in the health sector such as conducting health checks, posyandu, giving Indonesia Healthy Cards and mobile health centers. Most of the empowerment has not been successful because the Anak Dalam Tribe has not been able to become independent for themselves and their families, and they still have habits that are difficult to leave. Therefore, good cooperation between cross-sectors is needed so that prosperity is achieved.*

*Keywords: Empowerment; Implementation; Program Sustainability; Suku Anak Dalam*

### Riwayat Artikel

Diterima : 5 Oktober 2022

Ditelaah : 25 Oktober 2022

Dipublikasi : 31 Desember 2022

## PENDAHULUAN

Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok masyarakat sosial budaya yang bersifat lokal, homogen, terpencar, sulit dijangkau dan jarang terlibat dalam jaringan serta terbatas terhadap akses pelayanan sosial, ekonomi maupun politik (1). Berbagai permasalahan terjadi di Indonesia, termasuk permasalahan pada masyarakat Komunitas adat Terpencil, yaitu dari segi ekonomi, social, politik, pendidikan dan kesehatan. Keterasingan secara kewilayahan pada Komunitas Adat Terpencil ini, membuat masyarakat memiliki keadaan terbatas untuk mencapai daerah lain sehingga kesulitan dalam memperoleh kebutuhannya. Selain itu, jaraknya yang dinilai jauh dan keadaan yang terbatas dalam masalah sarana transportasi, maka komunitas ini membutuhkan tenaga lebih untuk mengisi kebutuhannya (2). Pada saat ini masih kurang keterlibatan seluruh komponen, baik dari pihak pemerintah, pihak swasta, *stakeholder*, dan masyarakat setempat untuk berkontribusi dalam pembangunan Komunitas Adat Terpencil. Permasalahan Komunitas Adat Terpencil harus menjadi perhatian dan prioritas dalam pembangunan nasional. Untuk meningkatkan kesejahteraan Komunitas Adat Terpencil perlu dilakukan berbagai upaya. Salah satunya melalui upaya pemberdayaan masyarakat Komunitas Adat Terpencil yang dilakukan secara Komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan melalui kerjasama lintas sektor (3)

Komunitas Adat Terpencil ini juga memiliki hak atas kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 pada pasal 5 ayat (1 dan 2) menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau (4). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Suku Anak Dalam (SAD) di bidang kesehatan telah dilakukan oleh Pemerintah (5). Kegiatan tersebut berupa pelayanan kesehatan langsung ke lokasi Komunitas Adat Terpencil Suku Anak Dalam. kemudian melakukan pengecekan kesehatan, pengobatan gratis, akses layanan ke RSUD Raden Mattaher, dan pembentukan kader untuk membantu proses persalinan. Sedangkan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Suku Anak Dalam adalah menyediakan pemukiman,

memberikan bantuan berupa makanan pokok dan ternak, membantu dalam pemberdayaan diri maupun keluarga, serta membantu dalam proses pemandirian Komunitas Adat Terpencil Suku Anak Dalam. Namun upaya yang telah pemerintah lakukan belum terealisasi dengan baik. Hal ini disebabkan Komunitas Adat Terpencil Suku Anak Dalam masih belum mampu memberdayakan dirinya maupun keluarganya secara mandiri. Komunitas Adat Terpencil Suku Anak Dalam hanya menerima bantuan dari Pemerintah tetapi belum dapat mengembangkan bantuan tersebut (5).

Jumlah populasi Komunitas Adat Terpencil yang ada di seluruh Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 249.282 Kepala Keluarga (KK). Dari jumlah tersebut, populasi masyarakat Komunitas Adat Terpencil yang telah diberdayakan sebanyak 105.388 KK. Selain itu, Komunitas Adat Terpencil yang berada dalam proses pemberdayaan sebanyak 4.127 KK dan yang belum dilakukan pemberdayaan sebanyak 139.767 KK (3). Provinsi Jambi Merupakan provinsi yang sebagian penduduknya berada dalam kategori Komunitas Adat Terpencil. Di Provinsi Jambi, Komunitas Adat Terpencil terbagi menjadi tiga suku, yaitu Suku Anak Dalam/Kubu, Suku Talang Mamak, dan Suku Bajau/ Suku Laut. Berdasarkan data terakhir sampai dengan pada tahun 2017 di Provinsi Jambi sebanyak 5.298 KK atau sekitar 21.194 Jiwa, dari jumlah tersebut sebanyak 3.413 KK sudah diberdayakan dan 1.885 KK yang belum diberdayakan (6).

Di Kabupaten Sarolangun diketahui bahwa tidak semua Suku Anak Dalam sudah diberdayakan. Pada tahun 2017 sejumlah 806 jiwa atau 230 KK sudah diberdayakan, 155 jiwa atau 37 KK sedang diberdayakan, dan 1186 Jiwa atau 294 KK belum diberdayakan. Sedangkan pada tahun 2019 sejumlah 515 jiwa atau 290 KK sudah diberdayakan, dan sejumlah 1.298 jiwa atau 326 KK belum diberdayakan. Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun telah melakukan program pembangunan pada Suku Anak Dalam, baik dari segi sosial, pendidikan, dan kesehatan.

Kecamatan Bathin VIII merupakan salah satu Kecamatan yang memiliki populasi Komunitas Adat Terpencil Suku Anak Dalam yang sudah mempunyai tempat tinggal, namun masih sulit dijangkau karena jaraknya yang jauh, penyebrangan sungai dengan jembatan gantung, dan melewati semak-semak. Kondisi tersebut, menyebabkan pemerintah sulit untuk melakukan pemberdayaan

secara rutin. Menurut Dinas Sosial Kabupaten Sarolangun, jumlah warga Suku Anak Dalam di Kecamatan Batin VIII sejumlah 253 jiwa. Pemerintah daerah setempat telah melakukan program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Komunitas Adat Terpencil Suku Anak Dalam dengan berbagai program tetapi belum berhasil.

Saat ini Puskesmas menjadi ujung tombak dalam pelayanan kesehatan. Puskesmas yang berada dalam lokasi yang terasingkan dan sangat terasingkan berjumlah 2.277. Untuk mengurangi perbedaan kualitas akses dan layanan antar daerah, terutama wilayah perbatasan, terpencil, dan kepulauan, berbagai kebijakan telah ditempuh dan selanjutnya diadopsi (7). Pemberdayaan Suku Anak Dalam saat ini belum berjalan dengan optimal, seperti masih adanya masyarakat Suku Anak Dalam yang belum terbiasa mandi dengan sabun, belum mengerti akan pentingnya kesehatan sehingga masyarakat Suku Anak Dalam belum bisa memandirikan diri sendiri maupun keluarga. Permasalahan yang lain adalah terdapat keadaan yang terbatas pada sarana dan prasana sosial yang digunakan untuk akses, seperti sarana kesehatan karena jarak dari daerah Suku Anak Dalam ke kota jauh, sehingga petugas kesehatan pun juga susah untuk ke daerah tersebut.

Peran pemerintah sangat penting dalam keberhasilan program pemberdayaan Suku Anak Dalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pemberdayaan Suku Anak Dalam di Kabupaten Sarolangun Tahun 2020.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jambi, yaitu Kabupaten Sarolangun pada bulan April-Juni 2021. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan telaah dokumen. Data selanjutnya di analisis dengan menggunakan metode Miles dan Huberman. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah enam orang yang terdiri dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sarolangun, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Dinas Sosial Kabupaten Sarolangun, Kepala Seksi KAT Dinas Sosial Kabupaten Sarolangun, Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Sarolangun, Kepala Puskesmas Limbur Tembesi Kabupaten Sarolangun, dan Pengelola Program Promosi Kesehatan Puskesmas Limbur Tembesi Kabupaten Sarolangun.

## HASIL

### Implementasi Program Pemberdayaan Bidang Sosial

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pemerintah di Kabupaten Sarolangun dalam pelaksanaan pemberdayaan bidang sosio-ekonomi sudah berperan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Suku Anak Dalam, pemberian jaminan hidup, pemberian bantuan sosial, pemberian rumah, pemantauan kehidupan masyarakat, pengajaran budi daya ternak, dan berkebun telah dilakukan. Hal ini di sampaikan oleh informan sebagai berikut :

*“Eeee... Ada Program jaminan hidup, program pendataan, bantuan social...”* (HF)

Hasil wawancara mendalam Informan lainnya mengatakan sebagai berikut:

*“...Pemberdayaan yang sudah masuk itu usaha sifatnya baru ternak kambing dari kementerian social, diserahkan sama bu risma itu, kalo untuk bimbingan itu sementara ini belum ada, yang ada di kabupaten ini hanya jadup (jaminan hidup) termasuk juga bantuan pemukiman”* (F)

Dalam rangka menjamin hak-hak dasar warga suku anak dalam maka diperlukan data-data kependudukan yang tercatat di catatan sipil, berupa pembuatan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. Dengan adanya data catatan sipil maka warga Suku Anak Dalam dapat mengakses fasilitas yang diberikan oleh negara berupa jaminan Kesehatan, jaminan Pendidikan dan program pemerintah lainnya. Hal ini di sampaikan oleh informan:

*“... kita sudah melakukan perekaman data untuk pembuatan KTP dan KK sehingga mereka sudah terdata di data kependudukan Kabupaten Sarolangun”* (HJ)

### **Implementasi Program Pemberdayaan Bidang Kesehatan**

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi yang dilakukan di bidang kesehatan, yaitu Dinas Kesehatan bekerja sama dengan puskesmas untuk melakukan kegiatan rutin setiap bulannya dengan mengadakan beberapa kegiatan. Di antaranya adalah pemberian Kartu Indonesia Sehat atau Kartu KIS, Puskesmas Keliling, Pengobatan massal, pengecekan kesehatan, posyandu dan penyuluhan kesehatan. Kegiatan tersebut dilakukan secara rutin setiap bulan. Hal ini di nyatakan oleh Informan sebagai berikut:

*... kegiatan kesehatan nanti kami turunnya bersama bidan desa disano, dokter, perawat, ado orang farmasi nyo jugo kegiatannya pengobatan masal penyuluhan Kesehatan ... (IS)*

Hal ini juga di sampaikan oleh informan lainya sebagai berikut :

*...Berjalan terus setiap bulan, Kito melakukan kunjungan sebulan sekali, jemput bola namonyo” (IS)*

Dari Hasil penelitian didapatkan bahwa masyarakat Suku Anak Dalam, kurang baik menerima pemerintah, namun pemerintah melakukan berbagai upaya pendekatan. Adapun pendekatannya dilakukan dengan cara berkunjung langsung ke lokasi dan bertemu dengan Tumenggung di lokasi serta menyampaikan maksud tujuan kedatangan pemerintah ke lokasi. Kemudian melakukan kunjungan sebulan sekali secara rutin, sampai akhirnya masyarakat Suku Anak Dalam tersebut bisa menerima kedatangan pemerintah ke lokasi Suku Anak Dalam. Hal ini di nyatakan oleh informan sebagai berikut :

*... iyo langkah awal kita melakukan sosialisasi ialah mulai pendamping yang ada di setiap kecamatan, desa dengan melibatkan semua unsur, bidang apa yang dia bisa mengayomi, ...., Penyuluh Lapangan memberikan Penyuluhanyo untuk berikan sosialisasi terhadap terkait dalam hal pemberdayaan ini sehingga pemerintah bisa di terima kehadirannya (HJ)*

### **Keberlanjutan Program**

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa keberlanjutan program ini akan terus dilakukan

setiap tahun, karena program pemberdayaan suku anak dalam dipastikan masuk dalam rencana strategis.

Pemerintah Sarolangun melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial berupaya melanjutkan program-program pemberdayaan terhadap warga Suku Anak Dalam dengan berbagi program setiap tahun. Berikut Kutipan Informan mengenai keberlanjutan program:

*“Yoo kito tetap berupaya, sebagai lintas sektor berupaya pemberdayaan ini kegiatannyo berlanjut, di setiap SUKU ANAK DALAM dalam kabupaten ini, namun yo harapan kito program ni bisa dilaksanakan tiap saat oleh masyarakat suku anak dalam” (HJ)*

Hal ini juga di sampaikan oleh informan lainya sebagai berikut

*...Insyallah tetap dijalankan untuk tahun berikutnya, apa yang sudah dilaksanakan kito tingkatan lagi, mano yang belum yo kito cari solusinyo,Saya harap supaya berlanjut terus dan sukses untuk pemberdayaan Suku Anak Dalam ini” (HF)*

Dalam melaksanakan program pemberdayan Suku Anak Dalam, banyak terkendala dengan hambatan-hambatan komunikasi dan kemampuan beradaptasi. Upaya-upaya tersebut di butuhkan kerja keras dan waktu yang panjang dalam membina warga suku anak dalam.

*“Pasti, karena yang menjadi visi dan misi pelayanan puskesmas limbur tembesi salah satunya ialah pelayanan suku anak dalam, mudah-mudahan program itu tetap dilaksanakan walaupun yo mungkin ado program yang belum tercapai karno Suku Anak Dalamnyo tad mengalami kesulitan untuk berdaptasi terhadap program yang dijalankan , tapi kito tetap akan melaksanakan program ini kok” (KN)*

Dalam melalukan keberlanjutan program diperlukan sinergi dari pendamping dan aparat Desa Baim di tingkat kecamatan maupun desa. Selain itu, dibutuhkan keberlanjutan anggaran program, sehinga program akan dapat terlaksana. Hal ini di sampaikan oleh informan sebagai berikut:

*...pelaksanaan pemberdayaan ini dan jago kito melakukan selalu sinergi dari pendamping, dari pihak aparat desa, kecamatan supaya memberikan pemberdayaan terhadap Suku Anak Dalam didalam desa kabupaten sarolangun (HJ)*

Hal ini juga di sampaikan oleh informan lainya sebagai berikut :

*"Kalooo di anggarkan program dapat terlaksana secara berlanjut ....jadi kita mulai dari bulan 4 itu off, tidak anggaran ga melaksanakan sama sekali" (KN)*

## **DISKUSI**

### **Implementasi Program PemberdayaanBidang Sosial**

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan ini akan berjalan jika terdapat anggaran dana yang diberikan pemerintah. Anggaran dana merupakan faktor pendukung dari berjalannya program pemerintah. Selain dana, terdapat juga faktor pendukung lainnya, seperti pemberian jaminan hidup, bantuan sosial dari pemerintah serta tersedianya mobilitas untuk mengunjungi lokasi Suku Anak Dalam tersebut. Namun, tingkat keberhasilan program ini sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat. Pemberian bantuan tidak mengubah kemandirian masyarakat Suku Anak Dalam, tetapi menjadikan sebuah ketergantungan terhadap bantuan-bantuan pemerintah.

Keberhasilan program pemberdayaan sangat ditentukan oleh kepedulian, keberpihakan dan komitmen pemerintah dan swasta dalam menyusun program-program pemberdayaan. Selain itu keterlibatan masyarakat dalam proses pemberdayaan merupakan kata kunci dan jaminan keberlanjutan program-program pemberdayaan tersebut (8).

Hasil penelitian terdahulu juga mengatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat mempengaruhi secara langsung keberhasilan dari sebuah program untuk ruang lingkup itu sendiri. Jika partisipasi masyarakat itu tinggi maka dapat dipastikan tingkat keberhasilan program tersebut akan tinggi pula, begitu pula sebaliknya (9,10).

Pelaksanaan pemberdayaan ini akan berjalan jika terdapat anggaran dana yang diberikan oleh

Pemerintah. Anggaran dana merupakan faktor pendukung dari sebuah berjalannya program pemerintah.

Selain dana, terdapat juga faktor pendukung lainnya, seperti pemberian jaminan hidup, bantuan sosial dari pemerintah, serta tersedianya mobilitas untuk mengunjungi lokasi Suku Anak Dalam tersebut. Namun tingkat keberhasilan program ini sangat di pengaruhi oleh partisipasi masyarakat.

Faktor penghambat pemberdayaan Suku Anak Dalam adalah kurangnya pemahaman masyarakat Suku Anak Dalam itu sendiri terhadap budi daya ternak dan berkebun yang telah dibina oleh Dinas Sosial. Pemerintah sudah membina namun tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat Suku Anak Dalam karena kurangnya pemahaman.

Namun hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa Suku Anak Dalam, telah mengerti banyak hal. Mereka mengetahui akan nilai tukar uang sehingga memudahkan mereka dalam jual-beli di pasar desa mereka. Beberapa sistem pengetahuan yang masih mereka pertahankan sampai sekarang ialah pengetahuan alam, berupa berburu. Mereka sangat ahli dan pandai dalam hal berburu hewan dan mereka juga mempunyai pengetahuan dalam hal menanam pohon dan upaya agar tanaman cepat subur dan pohon mana saja yang dapat merusak unsur tanah (11).

Hasil penelitian sebelumnya juga mengatakan bahwa pengetahuan merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam perubahan pola pikir dan perilaku. Pengetahuan ini merupakan domain penting dalam membentuk tindakan atau perilaku seseorang, dimana perilaku yang didasari pengetahuan akan lebih langgeng dari pada perilaku yang tidak didasari pengetahuan (12).

Faktor penghambat lain dari kemajuan Suku Anak Dalam adalah sulitnya akses jalan ke lokasi Suku Anak Dalam. Mereka harus menyebrangi sungai. Hal ini juga didukung hasil peneliti lain yang mengatakan bahwa di Indonesia banyak daerah yang sulit dijangkau oleh pelayanan kesehatan dasar rutin, seperti wilayah pegunungan, pedalaman dan rawa-rawa, pulau kecil, gugusan pulau dan daerah pesisir, serta daerah perbatasan (13).

Pemberdayaan Masyarakat Suku Anak Dalam hendaknya dipertimbangkan kemandirian sehingga setelah program selesai, tingkat ketergantungan terhadap program-program bantuan pemerintah

akan semakin berkurang dan mereka memiliki kemampuan untuk mengembangkan dirinya.

#### **Program Pemberdayaan Bidang Kesehatan**

Dari hasil penelitian mengatakan bahwa tingkat keberhasilan ini sebagian sudah berhasil. Hal ini, dilihat dari kinerja peran pemerintah melaksanakan program ini sudah berjalan lancar. Namun dari sisi peran masyarakat Suku Anak Dalam, belum berhasil. Tingkat keberhasilan ini diukur dari penerapan Suku Anak Dalam tersebut. Apabila masyarakat Suku Anak Dalam telah menerapkan kegiatan yang dibuat pemerintah dan dapat memandirikan diri dan keluarga maka hal itu dikatakan berhasil.

Penelitian ini didukung oleh peneliti lain yang menyatakan bahwa keberhasilan dari sebuah program dipengaruhi secara langsung oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam ruang lingkup itu sendiri (10). Bentuk kegiatannya pun beragam mulai dari pengobatan, penyuluhan kesehatan, dan posyandu bagi balita. Program pelayanan kesehatan langsung ini dipandu oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dan dilaksanakan di setiap Kabupaten yang terdapat Komunitas Adat Terpencil Suku Anak Dalam (5). Namun hal ini berlawanan dengan hasil terdahulu lainnya, yang menyatakan bahwa Komunitas Suku Anak Dalam sudah mulai menyadari akan pentingnya memenuhi kebutuhan hidup sehat, dengan perilaku hidup mereka yang penuh keterbatasan sehingga sangat rentan dengan kesehatan mereka. Secara perlahan warga Suku Anak Dalam mengerti tentang manfaat dari pelayanan kesehatan yang mereka terima selama ini (1).

Untuk tercapainya keberhasilan pelaksanaan program Suku Anak Dalam dibutuhkan kerja sama yang lebih baik agar dapat membantu proses memandirikan dan mensejahterakan Suku Anak Dalam. Selain itu, dibutuhkan komunikasi yang baik antar lintas sektor dengan melibatkan secara aktif Suku Anak Dalam sehingga solusi yang dilakukan dapat berhasil. Diperlukan juga langkah yang tepat, seperti sosialisasi serta peningkatan kinerja hubungan dengan masyarakat, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat mempertanggung jawabkan masalah kesehatan dirinya sendiri. Adapun solusi dari sudut pandang promosi kesehatan adalah berupa upaya mengajak seluruh lintas sektor untuk lebih memperhatikan kehidupan Suku Anak Dalam agar dapat hidup sejahtera. Pemberdayaan yang dilakukan lebih

ditingkatkan lagi melalui kunjungan setiap minggu agar masyarakat Suku Anak Dalam tersebut bisa mengubah pola hidup yang lebih baik. Pemerintah juga perlu melakukan pendekatan yang maksimal kepada Suku Anak Dalam sehingga pola pikir Suku Anak Dalam tersebut dapat berubah dan sesuai dengan masyarakat sekitar.

Pemukiman warga Suku Anak Dalam menyebar sehingga diperlukan upaya pemberdayaan bidang Kesehatan yang memadukan upaya promotif, preventif, dan kuratif, serta memadukan dengan pengobatan tradisional Suku Anak Dalam. Salah satunya dengan membuat layanan Suku Anak Dalam *Care*. Pelayanan ini terpadu secara *mobile* dengan mobil dengan disain Khusus(14). Pelayanan Kesehatan terhadap Suku Anak Dalam perlu pendampingan, tidak hanya berkunjung sebulan sekali tetapi juga diperlukan upaya pendampingan dengan menyediakan tenaga Kesehatan yang tinggal di pemukiman sehingga dapat memberikan pengalaman untuk hidup dan melakukan upaya promotif serta preventif.

#### **Keberlanjutan Program**

Keberlanjutan Program pemberdayaan Suku anak dalam di kabupaten Sarolangun masih terkendala dengan dukungan anggaran serta sinergi antar lembaga serta program pendampingan yang berkelanjutan. Keberhasilan program pemberdayaan sangat ditentukan oleh kepedulian, keberpihakan, dan komitmen pemerintah serta swasta dalam menyusun program-program pemberdayaan. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pemberdayaan merupakan kata kunci dan jaminan keberlanjutan program-program pemberdayaan tersebut (15). Untuk tercapainya pembangunan keberlanjutan, diperlukan tiga syarat, yaitu, keberlanjutan secara ekologis, ekonomi dan sosial. Selain itu, dibutuhkan juga kesungguhan pemerintah dalam melakukan pembangunan agar dapat menentukan arah dan kebijakan keberlanjutan suatu program yang telah dilaksanakan untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang (16).

#### **KESIMPULAN**

Kesimpulan penelitian ini adalah pemberdayaan sudah dilakukan terhadap Suku Anak Dalam di Kabupaten Sarolangun dalam peningkatan bidang ekonomi maupun bidang kesehatan. Tetapi belum memberikan dampak yang optimal terhadap kesejahteraan Suku Anak Dalam. Selain itu, program

belum dijalankan secara berkelanjutan karena kemampuan warga Suku Anak Dalam ketika menerima program dan anggaran guna menjalankan program kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perlunya pendampingan secara terus menerus ketika program pemberdayaan ekonomi.
2. diberikan kepada Suku Anak Dalam sehingga keberhasilannya diharapkan dapat terwujud.
3. Perlu menyiapkan anggaran dan program posyandu khusus bagi Suku Anak Dalam dan perlu pendampingan oleh petugas sehingga warga Suku Anak Dalam dapat meningkatkan upaya promotif dan preventif.
4. Perlu Kerjasama berbagai pihak dari sektor pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi untuk memberikan pendampingan dan ketrampilan suku anak dalam sehingga mampu meningkatkan kesejahteraannya.

- 10) kabupaten merangin. 2018;263–74
- 11) Dinas Sosial Kab. Sarolangun. Profil Suku Anak Dalam Kabupaten Sarolangun. 2019.
- 12) Mardiyati A, Gutomo T. Kemandirian dan pemberdayaan komunitas adat terpencil di kabupaten merangin. 2018;263–74.
- 13) Octavianus Katuhu. Evaluasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm-Md) Di Kecamatan Siau Timur. 2015;(Lmd):1–20.
- 14) Guspianto, Asparian EW. Studi Kualitatif : Faktor Predisposisi Sebagai Upaya Pencarian Pengobatan Pada Komunitas Adat Terpencil Di Desa Bukit Suban, Air Hitam Sarolangun, Jambi, Indonesia. J Kesmas Jambi. 2020;4(2):37–42.
- 15) Mohammad Mulyadi. Pemberdayaan Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Kehutanan. J Penelit Sos dan Ekon Kehutan. 2013;10(4):224–34.
- 16) Bahua MI. Model Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Boalemo. Vol. 1, Jurnal Pendidikan, Sosial , dan Budaya. 2015. p. 2015.

## DAFTAR PUSTAKA

- 1) Qordriyatun SN. Pengabaian Negara Atas Hak Hidup Masyarakat Adat. Info Singk Kesejaht Sos. 2015;VII(06).
- 2) Suyanto BM. Studi Kebijakan Pengembangan Sinergitas Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Nusa Tenggara Timur. Sosiokonsepsia. 2013;Vol 18(2):183–204.
- 3) Direktorat jenderal pemberdayaan sosial.Kemsos. RI.2019. Program dan Kegiatan Pemberdayaan Sosial. In.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- 5) Febi Rizka Eliza MR dan DN. Peran Pemerintah Terhadap Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Suku Anak Dalam (Suku Anak Dalam) Di Provinsi Jambi Tahun 2018. J Kesmas Jambi. 2018;Vol 2(1).
- 6) Dinsosdukcapil Provinsi Jambi.2017. Profil Komunitas Adat Terpencil dan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Provinsi Jambi.
- 7) Lilis Komariah, S.Gz, Nurul Imani SKM.Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskemas. Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat. 2018.
- 8) Askar Jaya. Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development ). Tugas Individu Pengantar Falsafah Sains Semester Ganjil 2004. 2004;1–11
- 9) Mardiyati A, Gutomo T. Kemandirian dan